

BAB III

RAMSI SEBAGAI BENTUK INTERVENSI AUSTRALIA

Pada BAB III ini akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya RAMSI, bentuk misi yang akan dilakukan oleh RAMSI dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Solomon. Selain itu juga akan dijelaskan bentuk intervensi Australia melalui RAMSI di Kepulauan Solomon dan keberhasilan Australia melalui RAMSI menyelesaikan konflik di Kepulauan Solomon.

3.1 Latar Belakang Terbentuknya RAMSI

Konflik etnis pada tahun 1998 merupakan bentuk konflik etnis yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga berdampak terhadap perkembangan negara Kepulauan Solomon. Bukan hanya itu, konflik tersebut juga akan dapat berdampak terhadap pulau-pulau yang berada di kawasan Pasifik Selatan jika tidak diselesaikan. Kekhawatiran timbul dalam diri Australia, seperti yang kita ketahui bahwa negara Australia adalah negara yang sangat peduli dengan keamanan negaranya, Australia membentuk sebuah program yang merupakan sebuah bentuk permintaan bantuan oleh Solomon kepada Australia.

Akibat dari konflik etnis yang berkepanjangan, Kepulauan Solomon menjadi *failed state*, dalam jurnal Kabutaulaka terdapat laporan dari *the Australian Strategic Policy Institute* menyatakan bahwa, Kepulauan Solomon merupakan salah satu

negara terdekat dengan negara Australia yang menjadi negara gagal (*failed state*) dan mengatakan bahwa Australia harus pro-aktif untuk mencegahnya karena dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia serta terorisme.¹⁰³

Begitu pula saat mengumumkan usulan melalui ABC Radio tahun 2003, bahwa intervensi terhadap Kepulauan Solomon segera dilakukan. Perdana Menteri Australian John Howard mengatakan kepada Federal Parlemen bahwa:

“...if we do nothing now and the Solomon Islands becomes a failed state, the challenge in the future of potential exploitation of that situation by international drug, dealers, money launders, international terrorism all of those things will make the inevitable dealing with the problem in the future more costly, more difficult.”¹⁰⁴

Oleh karena itu, pada 5 Juni 2003, sebagai bentuk respon pemerintah Australia terhadap permintaan pemerintah Solomon, Australia memutuskan untuk memimpin *Pacific Island Forum* (PIF)¹⁰⁵. *Pacific Island Forum* merupakan organisasi kebijakan politik dan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan. *Pacific Islands Forum* (PIF) merupakan sebuah forum di kawasan Pasifik yang mengedepankan kerjasama regional untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dari dinamika kawasan tersebut.¹⁰⁶ PIF didirikan pada tahun 1971 dengan nama *South Pacific Forum* (SPF)

¹⁰³ Tarcisius Tara Kabutaulaka, *Op.Cit.*, hal 295

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Pacific Islands Forum* (PIF) merupakan sebuah forum di kawasan Pasifik dalam mengedepankan kerjasama regional untuk mengatasi masalah di kawasan. Anggota PIF saat ini terdiri dari 18 anggota negara yaitu: Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Solomon Kepulauan, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

¹⁰⁶ Bernadetha Indreswari Wisnuputri, *Op.Cit.*, hal 16

yang meliputi 16 negara¹⁰⁷ antara lain Australia, Kepulauan Cook, Federated States of Micronesia, Fiji, Kribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.¹⁰⁸

Pacific Islands Forum memiliki visi yang sangat kuat dalam bidang keamanan dan perdamaian dalam kawasan, untuk mencapai itu PIF mengembangkan dan mengutamakan kerjasama antar pemerintah, bekerja sama dengan lembaga internasional. Sejak tahun 1989, PIF telah mengadakan pertemuan tahunan dengan mitra dialog utama di tingkat Menteri. Forum tersebut memiliki 13 mitra dialog yaitu Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, dan Uni Eropa.¹⁰⁹

Terkait dengan konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon, pada April 2003 Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sir Allan Kamakeza membuat permintaan bantuan internasional. Sebagai tanggapannya, negara-negara di kawasan Pasifik, melalui PIF setuju untuk mendukung misi bantuan regional yang dipimpin dan didanai oleh Australia dan Selandia Baru dengan anggota PIF lainnya. Misi bantuan akan dibentuk dibawah prinsip-prinsip Deklarasi Biketawa¹¹⁰, yang disebut dengan *Regional Assistance Mission to the Solomon Islands* (RAMSI). Melalui itu negar-

¹⁰⁷ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 16 negara anggota yang tergabung dalam PIF, karena dalam konteks penelitian ini konflik etnis terjadi ketika anggota PIF berjumlah 16 negara dan 13 mitra dialog. Namun saat ini, setelah konflik selesai anggota PIF berjumlah 18 negara dan 16 negara mitra dialog

¹⁰⁸ *Pacific Island Forum (PIF)*, diakses dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/PIF.aspx>, (04/05/2017, 13.20 WIB)

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Deklarasi Biketawa merupakan deklarasi yang disetujui bersama oleh negara-negara anggota PIF pada bulan oktober 2000, dengan tujuan untuk menanggulangi krisis keamanan yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan.

negara yang tergabung dalam forum tersebut dapat membentuk misi dan mengirimkannya ke negara-negara anggota atas permintaan negara yang terkena dampaknya.¹¹¹

3.2 Misi *Regional Assistance Mission to the Solomon Islands* (RAMSI)

Menindaklanjuti permintaan bantuan Perdana Menteri Kep. Solomon, Sir Allan Kemakeza pada April 2003, misi bantuan bagi Kepulauan Solomon yaitu terbentuknya RAMSI, yang mana Australia sebagai pemimpin dan penyandang dana utama dari RAMSI. Misi bantuan yang dilakukan oleh RAMSI terdapat mekanisme *nation-building framework* dari Australia, yaitu tentang *peace and security*. Perdamaian dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan sangat penting, bagi Australia penyelenggaraan proses *nation-building* merupakan salah satu komponen sangat penting dalam kebijakan keamanan. Sebagai negara hegemon, Australia memiliki andil yang besar dalam mengatasi kemananan di kawasan Pasifik Selatan dan akan memberi keuntungan bagi Australia dan tentunya bagi kawasan Pasifik Selatan itu sendiri.¹¹²

Untuk melancarkan misinya, RAMSI memiliki 4 komponen utama yaitu *Office of the special Coordinator* (OSC), *the Participating Police Force* (PPF), *the Combined Task Force* (CTF) and *the Civilian Development Programs*.¹¹³ Yang

¹¹¹ PACIFIC ISLANDS FOTUM SECRETARIAT, *The Pacific Islands Forum*, Loc, Cit

¹¹² Mark Sheprad, 2009, "Australia's Nation-Building An Assessment of its Contribution to Regional Security in the Pacific and a New Policy to Guide its Future", dalam The Australian National University Strategic and Defense Studies Center, Working Paper No. 413, Published by the Strategic and Defence Studies Centre at the Australian National University, Canberra, diakses dalam https://www.files.ethz.ch/isn/100052/wp_sdsc_413.pdf, (05/05/2017, 20.00 WIB)

¹¹³ About RAMSI, di akses dalam <http://www.ramsi.org/about-ramsi/>

pertama, Office of the special Coordinator (OSC), atau koordinator khusus yang dipimpin oleh Australia, yaitu Nick Warner (2003-2004),¹¹⁴ koordinator memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi kebijakan secara keseluruhan, mengawasi dari semua aspek RAMSI. Serta bertanggungjawab untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah Kepulauan Solomon, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan negara-negara yang berkontribusi.

Kedua, the Participating Police Force (PPF), yang di komandokan oleh Ben McDevitt (2003-2004), bahwa fokus awal dari PPF sendiri adalah untuk memulihkan hukum dan ketertiban, mengumpulkan senjata dan menangkap tersangka. Akan tetapi posisi PPF hanya sementara, karena digantikan oleh RSIPF (*Royal Solomon Islands Police Force*). PPF sekarang difokuskan untuk membangun kemampuan RSIPF, terutama dalam pengembangan kepemimpinan, manajemen ketertiban umum, sumber daya manusia dan fungsi administratif yang diperlukan untuk mendukung yang terlibat dalam RSIPF.

Ketiga, Combined Task Force, komandan satuan tugas gabungan adalah komandan dari kontingen militer RAMSI yaitu LTCOL John Frewen mulai 24 July 2003-19 November 2003. Pada periode awal setelah kedatangan RAMSI pada tahun 2003, peran dari komponen militer RAMSI adalah untuk memberikan perlindungan bagi PPF dan bagian lain dari misi serta posisi tersebut dipegang oleh Australia. Hal

¹¹⁴ Hampir semua Koordinator Khusus RAMSI bahkan mantan dari Koordinator berasal dari diplomat Australia, karena Australia adalah negara kontributor terbesar dan merupakan sebuah perjanjian dari RAMSI sendiri.

tersebut diperlukan karena situasi hukum dan ketertiban yang tidak stabil dan banyaknya senjata yang dipegang secara ilegal yang ada di komunitas Kepulauan Solomon pada saat berkonflik.

Keempat, the Civilian Development Programs, Margret Thomas (2003) sebagai koordinator. Sebelumnya di bawah RAMSI, terdapat tiga program utama pembangunan sipil, yaitu program hukum dan keadilan, program Machinery of Government dan program tata kelola ekonomi. Koordinator pembangunan bertanggung jawab atas pengelolaan program-program tersebut, dan dilaporkan ke koordinator utama dari RAMSI. Namun, program-program tersebut telah dialihkan ke mitra bantuan bilateral pada 1 Juli 2013 sebagai bagian transisi.¹¹⁵

Pada bulan Juli 2003, RAMSI melakukan misinya di Kepulauan Solomon atas permintaan pemerintah Kepulauan Solomon terkait dengan konflik etnis yang tidak kunjung selesai.¹¹⁶ Proposal misi bantuan RAMSI diserahkan pemerintah Australia kepada pemerintah nasional Kepulauan Solomon. Pada bulan Juli 2003, Parlemen Nasional Kepulauan Solomon kemudian menerima keberadaan misi RAMSI dengan mengesahkan *Facilitation of International Assistance Act*. Regulasi ini mendukung segala bentuk kegiatan RAMSI yang sah secara hukum dan mendapat kemudahan di segala bidang terkait dengan kondisi Kepulauan Solomon.¹¹⁷ Oleh karena itu, kemunculan RAMSI di kawasan Pasifik Selatan sangat penting bagi stabilitas keamanan Pasifik Selatan khususnya Kepulauan Solomon pada masa itu. Bukan

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Tarcisius Tara K, *Op.Cit*, hal 295

¹¹⁷ Bernadetha Indreswari W, *Op.Cit.*,hal 23

hanya mengatasi masalah konflik keamanan, RAMSI juga mengatasi masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan isu HAM dan pendidikan di kawasan Pasifik Selatan. Sejak tahun 2003, RAMSI banyak melakukan kerjasama dengan anggota keamanan Kepulauan Solomon yaitu, polisi, militer dan sipil dengan tujuan untuk melakukan misi dan perdamaian di Kepulauan Solomon.¹¹⁸

Setelah disahkannya *Facilitation of international Assistance Act*, bantuan gelombang pertama dari RAMSI adalah mendarat di Honiara. Ratusan tentara, polisi *civil servants* gabungan dari Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Kribati, Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Samoa, Tonga dan Vanuatu datang ke Kepulauan Solomon. Perwakilan Senior dari *Departemen of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia, Nick Warner merupakan orang yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pertama dalam misi tersebut, dibantu oleh Ben McDevitt dari Australian Federal Police dan Letnan Kolonel John Frewen dari *Australia Defence Force*.¹¹⁹

Terlepas dari itu, bentuk mekanisme *nation-building* yang diterapkan di RAMSI adalah mengikuti *framework* proses *nation-building* yang dimiliki oleh Australia yang diterapkan di Pasifik Selatan secara komprehensif serta operasional penegakkan dari norma-norma Deklarasi Biketawa. (1) *peace and security*, (2) *humanitarian assistance*, (3) *essential service*, (4) *institutional capacity building*, (5) *socio-economic development*, (6) *democratic government*.¹²⁰ Semua bentuk

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Evi Fitriani, *Op.Cit.*, 148

¹²⁰ Mark Sheprad, 2009, *Op. Cit*,

framework tersebut dilakukan oleh RAMSI dalam mengembalikan Kepulauan Solomon.

3.3 Intervensi Australia Melalui RAMSI di Kepulauan Solomon

Intervensi yang dilakukan oleh Australia melalui RAMSI terhadap Kepulauan Solomon bukanlah intervensi militer, melainkan intervensi kemanusiaan bersifat tidak memaksa. Intervensi kemanusiaan bersifat tidak memaksa adalah bentuk intervensi dimana masih diusahakannya cara damai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Seperti dengan pengamanan senjata, pemberian sanksi atau embargo dalam bidang ekonomi, diplomatik dan politik.¹²¹

Kehadiran RAMSI pasca konflik di Kepulauan Solomon berdasarkan atas permintaan pemerintahan Solomon yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap negara dalam satu kawasan yang telah mengalami keterpurukan akibat ketegangan yang terjadi antara 2 kelompok yaitu GRA dan MEF. Mengacu kepada *Facilitation Of International Assistance Act* tahun 2003 No. 1 yang menyatakan bahwa tujuan umum dari operasi tersebut adalah untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyat serta properti, menjaga ketersediaan layanan publik bagi masyarakat, mencegah kekerasan, intimidasi dan kejahatan, menjaga hukum dan ketertiban, mendukung dan mengembangkan institusi pemerintah serta tanggap bencana.¹²²

¹²¹ Sofyan Patrich layuk, *Op.Cit.*, hal 16-17

¹²² *Ibid.*,

Tahun 2003, RAMSI mendarat di Honiara, ratusan tentara, polisi *civil servants* gabungan dari Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Kribati, Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Samoa, Tonga dan Vanuatu datang ke Kepulauan Solomon. Perwakilan Senior dari *Departemen of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia, Nick Warner merupakan orang yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pertama dalam misi tersebut, dibantu oleh Ben McDevitt dari *Australian Federal Police* dan Letnan Kolonel John Frewen dari *Australia Defence Force*.¹²³

Intervensi yang dilakukan oleh RAMSI sangat berkaitan erat dengan *framework nation-building* yang dilakukan di Solomon. Oleh sebab itu, dalam bidang keamanan, *nation-building* yang pertama yaitu *peace and security*, keamanan dan perdamaian merupakan pondasi yang utama dalam mewujudkan *nation-building* di Kepulauan Solomon. Seperti yang telah pada bab sebelumnya, bahwa RAMSI melakukan kerjasama dengan pasukan gabungan dari *Australian Defence Force* (ADF), kepolisian Australia, dan badan kepolisian Kepulauan Solomon. Tujuannya adalah melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang dibutuhkan untuk merestorasi kondisi Kepulauan Solomon. Namun, ketika kondisi Solomon mulai menjadi lebih stabil, badan kepolisian Kepulauan Solomon bersama elemen-elemen sipil diharapkan akan kembali memperoleh supremasi. Sementara itu, keamanan tetap difasilitasi oleh *Australian Federal Police* (AFP), bekerjasama dengan negara PIF lainnya. Kondisi

¹²³ Evi Fitriani, *Op.Cit.*, hal 148

keamanan yang terkondisikan akan lebih mempermudah jalannya proses *nation-building*.¹²⁴

Selain itu juga, dalam mewujudkan keamanan yang stabil RAMSI memperbaiki dari (RSIPF) dengan program-program pelatihan dan pembangunan kapasitas. Sehingga keamanan dan ketertiban Kepulauan Solomon bergantung pada kinerja RSIPF. Selain itu menciptakan sistem hukum yang baik dan independen dengan tujuan untuk dapat mengatasi keadaan Kepulauan Solomon. *Kedua, humanitarian assistance*, hal ini berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat, dengan melakukan perbaikan sarana-sarana sanitasi dan kesehatan, menjamin ketersediaan pangan serta pembangunan tempat-tempat perlindungan pengungsi yang layak di daerah konflik.¹²⁵

Ketiga yaitu essential service, RAMSI melaksanakan pengefektifan kinerja badan-badan usaha milik negara dengan pengadaan sarana publik bagi masyarakat luas baik perkotaan maupun pedesaan. Seperti perbaikan sarana kesehatan, memperbaharui sistem pendidikan serta memberikan pendanaan publik, yang digunakan untuk membayar tunggakan gaji pegawai negeri. *Keempat, socio-economic development*. Untuk mewujudkan misi *economic development*, RAMSI memiliki tugas untuk membantu pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat Solomon. Kemudian menciptakan Kepulauan Solomon yang lebih makmur serta menciptakan Kepulauan Solomon untuk lebih aman dan damai. Perbaikan sarana-

¹²⁴ *Ibid.*, hal, 11

¹²⁵ *Ibid.*, hal 148

sarana dan fasilitas publik penting untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah konflik. selain negara-negara, RAMSI juga memiliki mekanisme kerjasama dengan beberapa NGO, terutama untuk mewujudkan pembangunan sosial di Kepulauan Solomon.¹²⁶

Adapun usaha-usaha untuk mereformasi dan menstabilkan perekonomian difokuskan terhadap pembangunan-pembangunan bisnis berbasis lokal, baik di sektor formal maupun informal dengan bimbingan spesialis ekonomi. Untuk menegakkan hukum di Kepulauan Solomon dilaksanakan secara simultan, transparansi yang ada dipemerintah akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengubah kerugian yang telah terjadi di dalam badan pemerintahan Kepulauan Solomon. Seperti, korupsi yang telah terjadi membuat lumpuh segala koordinasi yang dilakukan oleh badan pemerintah, baik dari koordinasi keamanan hingga koordinasi keuangan negara.¹²⁷

Kelima, yaitu *institutional capacity building* yang dicapai dengan melakukan program promosi pemerintahan yang baik, membentuk satuan kerja anti-korupsi permanen, meningkatkan kemampuan pada kelengkapan pemerintahan, peningkatan koordinasi antarkementerian serta perbaikan manajemen sumber daya. Sedangkan untuk intervensi *democratisation* atau *democratic government*, merupakan point yang paling penting dan dijadikan sebagai sasaran akhir dari program RAMSI. Hal ini dicapai dengan penguatan kapasitas komisi pemilihan, pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, aman, dan bersih, melakukan sosialisasi nilai-nilai demokrasi pada sistem

¹²⁶ Evi Fitriani, *Op.Cit*, hal 150

¹²⁷ Mark Sheprad, 2009, *Op. Cit*,

pendidikan dan masyarakat serta menguatkan peran media dan memperbaharui regulasi untuk menjamin kebebasan individu. Untuk itu RAMSI dalam mengubah Solomon menjadi negara demokratis harus berhasil dalam menciptakan keamanan dan perdamaian Solomon.¹²⁸

Pada tahun 2003, untuk meningkatkan kualitas pemerintahan Solomon dan pembangunan ekonomi, RAMSI bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Solomon, dengan melakukan proses perubahan Kabinet, merekrut dan melatih serta membayar pegawai negeri untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, mengontrol anggaran keuangan negara dan manajemen keuangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk bidang pembangunan ekonomi, RAMSI bekerjasama dengan pemerintah Kepulauan Solomon dengan kembali membuka perusahaan yang lebih besar seperti tambang mas milik Australia dan perkebunan kelapa sawit di Guadalcanal. Yang pada intinya bahwa, semua proses yang dilakukan oleh RAMSI merupakan hasil gagasan dari negara Australia dan didanai langsung oleh Australia sendiri.¹²⁹

Sekitar enam bulan Australia melakukan intervensi, terdapat laporan retrospektif dari RAMSI yaitu Koordinator Khusus Nick Warner menyatakan sebuah pendapat berdasarkan yang diamati saat melakukan intervensi. Konferensi Keamanan Nasional Australia 2004 di Sydney, Warner mengamati bahwa runtuhnya lembaga-

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Mark Sheprad, 2009, *Op. Cit*,

lembaga negara di Kepulauan Solomon bukan hanya menjadi masalah internal, melainkan menjadi masalah regional:

“...From Australia’s perspective, intervening to ensure Solomon Islands did not descend into chaos was now an imperative. Plainly, a dysfunctional Solomon Islands held long term dangers for Australia and the region. A country beholden to armed thugs is a recipe for chronic instability. Such instability is an invitation to transnasional crime. Experience elsewhere shows that weak states are also attractive as havens for money laundering, people smuggling, drug smuggling and terrorisme. And while there was no evidence that transnasional criminals were targeting Solomon Islands, there was no point waiting for this happen.”¹³⁰

Oleh karena itu, alasan Australia untuk membinau Kepulauan Solomon adalah karena kegagalan negara Solomon akibat konflik, yang dapat mengakibatkan munculnya kejahatan transnasional seperti penggunaan narkoba, pencucian uang, penyelundupan manusia dan terrorisme.

3.4 Keberhasilan Australia Melalui RAMSI di Kepulauan Solomon

Sejak pembentukan RAMSI pada 24 Juli 2003, Australia mengirimkan 1500 tentara, 150 polisi, 90 personil pendukung beserta kapal laut dan udara.¹³¹ Keberhasilan Australia melalui RAMSI ditandai dengan berhasilnya RAMSI mengamankan berbagai macam bentuk senjata, dimulai dengan penyerahan senjata api sekitar 2.500 senjata dan 300.000 Amunisi, termasuk SR88s dan senapan mesin

¹³⁰ Tarcisius Tara K, *Op.Cit*, hal 295

¹³¹ Evi Fitriani, *Op.Cit.*, hal 102

ringan serta revolver, semua senjata tersebut berasal dari Honiara dan Malaita.¹³² RAMSI juga mampu memperkuat penegakkan hukum dan sepremasi hukum melalui *Participating Police Force* (PPF). Yang mana semua polisi dikerahkan ke seluruh pulau, untuk mengatasi kriminal di masyarakat Solomon. Sampai pada 5 tahun kedatangan RAMSI di Kepulauan Solomon, pasukan penegak hukum di bawah RAMSI telah berhasil juga menangkap lebih dari 6.000 militan, membuat 9.000 tuntutan hukum, dan telah menyita lebih dari 3.000 pucuk senjata.¹³³ Selain itu juga RAMSI bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Papua Nugini dalam mengamankan senjata. Pada akhir November 2003, sekitar 3.700 termasuk 660 senjata militer bertenaga tinggi berhasil terjual dan telah diserahkan kepihak yang berwenang.¹³⁴ Kemudian sekitar 24 Juli samapi dengan 24 Desember 2003, terdapat 733 orang berhasil ditangkap oleh RAMSI.¹³⁵

Kemudian untuk bidang sosial dan ekonomi, Australia melalui RAMSI banyak memberikan bantuan dan didanai langsung oleh Asutralia lembaga penyalur bantuan luar negeri Asutralia yaitu AusAID. Tercatat pada tahun anggaran peluncuran RAMSI tahun 2003/2004, Australia menyalurkan dana sekitar A\$ 37,4 juta. Jumlah ini tergolong masih elatif kecil karena pada tahun-tahun berikutnya yaitu mulai tahun anggaran 2004/2005 hingga tahun 2011/2012 jumlah bantuan pembangunan Asutralia untuk Kepulauan Solomon berkisar di antara angka A\$ 200

¹³² Clive Morre, "The RAMSI Intervention In The Solomon Islands Crisis", dalam *The Journal Of Pacific Studies*, Vol. 28, No.1, 2005, hal. 56-77, diakses dalam <https://www.usp.ac.fj/fileadmin/files/Institutes/jps/CliveMoore.pdf>, (04/05/2017, 16.30 WIB)

¹³³ Evi Fitriani, *Loc.Cit.*

¹³⁴ Clive Morre, *Loc.Cit.*

¹³⁵ Tarcisiua Tara K, *Op.Cit*, hal 297-299

juta- A\$ 260 juta. Bantuan pertama dengan jumlahnya yang relative kecil dikarenakan pada tahun pertama, RAMSI berfokus pada pondasi keamanan dan bantuan kemanusiaan terlebih dahulu.¹³⁶

Australia juga melalui AusAID memberikan bantuan humaniter dan perbaikan sarana-sarana dan fasilitas publik penting untuk menaikkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah konflik. RAMSI juga memiliki mekanisme kerjasama dengan beberapa NGO.¹³⁷ Pada awal tahun 2005, perekonomian Solomon mulai stabil, terdapat perbaikan negara yang sudah bisa melayani masyarakat dan membiayai pegawai negeri. Hal ini disebabkan karena adanya manajemen yang lebih baik dari sebelumnya. Tahun 2004, anggaran didanai oleh bantuan-bantuan dari negara lain yaitu Australia untuk melakukan kontribusi sejumlah 24,6% dari pendapatan dan 100% dari pengeluaran pembangunan.¹³⁸

Selain itu juga dalam bidang *humanitarian assistance* seperti halnya dalam kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sarana publik baik di pedesaan maupun di perkotaan sudah terpenuhi karena mendapat bantuan dari Australia. Atas bantuan yang diberikan terhadap Solomon dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi menjadikan Kepulauan Solomon sebagai negara demokrasi.¹³⁹

¹³⁶ Barnadetha Indreswari Wisnuputri, *Loc.Cit*

¹³⁷ Evi Fitriani, *Loc.Cit*.

¹³⁸ Tarcisius Tara K, *Op.Cit* 297-299

¹³⁹ Evi Fitriani, *Loc.Cit*.